

Bantuan Sosial Tunai terpaksa disalurkan hanya Rp500 ribu per KPM



Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap III periode April -Juni 2020 bagi KPM terdampak COVID 19 di Aula Dinsos Kabupaten HSU Kalsel, qRabu (5/8). (AntaraneWS Kalsel/Eddy Abdipiah)

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Selasa (4/8) terpaksa disalurkan Rp500 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diambil dari alokasi dana APBD Hulu Sungai Utara.

Pasalnya alokasi BST dari dana APBD Provinsi Kalsel hingga hari kedua penyaluran Rabu (5/8) belum kunjung diterima.pihak penyalur Bank Kalsel.

Kepala seksi pengelolaan Darta dan PFM Dinsos HSU Muhammad Zaky Mubarak di Amuntai, Rabu (5/8) mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel namun jadwal penyaluran BST tahap III tidak bisa diundur.

"Seharusnya dana BST disalurkan Rp600 per KPM per bulan, namun kita tetap menyalurkan BST tahap tiga sesuai jadwal meski hanya sebesar Rp500 ribu per KPM," ujar Zaky.

Sisa pencairan sebesar Rp100 ribu per KPM dari dana APBD Kalsel disalurkan nanti dan diharapkan sudah cair dalam satu atau dua hari kedepan.

Ia menginformasikan, jika alokasi BST sebesar Rp600 per KPM per bulan berasal dari alokasi dana APBD HSU sebesar Rp500 ribu dan alokasi APBD Kalsel Rp100 ribu.

Sejak Selasa, melalui pihak penyalur Bank Kalsel disalurkan dana BST bagi KPM terdampak COVID 19 untuk periode April Mei dan Juni 2020.

Penyaluran dilaksanakan di Di Aula Dinas Sosial Kabupaten HSU Selama empat hari sejak Selasa hingga Jum'at (7/8). Dana BST diserahkan kepada masing-masing kepala desa yang kemudian dibagikan kepada KPM di masing-masing desa.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/189466/bantuan-sosial-tunai-terpaksa-disalurkan-hanya-rp500-ribu-per-kpm>)

Penerima bansos program sembako ini merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sangat terdampak pandemi Covid-19.

"Mereka yang menerima program ini sudah terdaftar di DTKS. Pada DTKS telah dilakukan _up date serta telah siap digunakan," katanya.

Diluncurkannya BST KPM Program Sembako Non-PKH ini merupakan menambah jenis bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Sebagaimana diketahui, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi, salah satu kebijakan pemerintah adalah membantu melalui skema jaring pengaman sosial (JPS).

Bantuan sosial (bansos) dari Kemensos berupa bansos reguler dan bansos khusus. Pada bansos reguler, Kemensos meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan. Kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Kepesertaan KPM Program Sembako diperluas dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan ditingkatkan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan.

Kemudian bansos khusus berupa Paket Sembako Bantuan Presiden untuk 1,9 juta KPM di Jakarta dan Bodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp600 ribu/KPM/Bulan. Dan BST untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp600 ribu/KPM/Bulan.

Kedua jenis bansos khusus ini diperpanjang untuk periode Juli-Desember dengan indeks Rp 300 ribu/KPM/bulan.

(Diringkas dan dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/mensos-berikan-bantuan-tunai-rp-500-ribu-untuk-penerima-kpm-bpnt.html>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *Bantuan Sosial Tunai terpaksa disalurkan hanya Rp500 ribu per KPM*, 05 Agustus 2020.
2. <https://www.merdeka.com>, *Mensos Berikan Bantuan Tunai Rp 500 Ribu untuk Penerima KPM BPNT*, 31 Agustus 2020.

Catatan:

Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Syarat:

Pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

Bentuk bantuan: Tunai

Besaran bantuan: Rp 600.000,-/KK

Durasi waktu bantuan: 3 bulan (April – Juni 2020)

Kuota: 9 juta kepala keluarga

Cara penyaluran: (1) Transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri; dan (2) Dikirim ke alamat penerima melalui PT. Pos Indonesia, bagi yang tidak memiliki rekening di bank.